

Transisi yang Berkeadilan: Industri Keuangan Syariah Melampaui Greenwashing

Penulis : Leonard Tiopan Panjaitan
Profil : Senior Consultant for Sustainability, Climate Risk & Green Productivity di Trisakti Sustainability Center, dan Anggota Aktif - Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP)
No. Anggota ICSP : 10261543



Industri keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan secara global, dengan total aset yang diproyeksikan melampaui US\$6 triliun pada akhir tahun 2026. Seiring dengan ekspansi tersebut, kini industri ini dihadapkan pada tantangan besar yaitu meningkatnya ekspektasi publik terhadap praktik keberlanjutan yang dijalankan, terutama dalam penyaluran modal ke sektor ekonomi riil.

Anggota Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) yang juga merupakan Senior Consultant for Sustainability, Climate Risk & Green Productivity di Trisakti Sustainability Center, Leonard Tiopan Panjaitan, berbagi pandangan dalam tulisannya yang menyoroti potensi perkembangan kinerja keberlanjutan industri keuangan syariah, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, masa depan industri keuangan syariah terletak pada peningkatan efisiensi sumber daya di tingkat operasional melalui produktivitas hijau (*green productivity*) serta integrasi mitigasi risiko iklim yang terukur dalam setiap keputusan pembiayaan, sejalan dengan prinsip *Hifz al-Bi'ah* atau pelestarian lingkungan.

“Pembuat kebijakan dan pimpinan lembaga keuangan perlu mulai mengintegrasikan penilaian produktivitas hijau dan pengukuran ketahanan risiko iklim secara langsung ke dalam kontrak pembiayaan syariah,” ucap Leonard dikutip dari Islamic Finance News (IFN) (7 April 2026) dan Green and Productivity Bulletin (16 April 2026).

Ia menekankan bahwa industri keuangan syariah perlu melampaui era greenwashing, yaitu berhenti memandang keberlanjutan sebagai sekadar alat pemasaran. Banyak metodologi maupun standar keberlanjutan yang berkembang di level global, dan perlu diadopsi oleh ekosistem keuangan syariah global ke depan.

“Saat ini, kombinasi antara ASEAN Taxonomy, standar pengungkapan risiko IFRS S2, serta tingginya permintaan pasar terhadap sukuk berkelanjutan telah menghilangkan berbagai alasan untuk menunda tindakan nyata,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Green Productivity, ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance, dan IFRS S2 dapat menjadi kerangka yang saling melengkapi untuk membantu lembaga keuangan syariah mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan risiko iklim ke dalam proses pembiayaan serta pengambilan keputusan.

Produktivitas hijau (*Green Productivity*) sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan

Produktivitas hijau (*Green Productivity*) diperkenalkan oleh Asian Productivity Organization (APO), sebagai sebuah pendekatan atau metodologi untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan mengukur keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kelestarian lingkungan.

Melalui Green Productivity Index (GPI), industri keuangan syariah, terutama perbankan syariah dapat lebih menyalurkan pembiayaan yang bertanggung jawab.

“Bank dapat menilai dan memberikan insentif pembiayaan berdasarkan peningkatan kinerja produktivitas hijau yang dapat dibuktikan. Debitur yang menunjukkan peningkatan efisiensi secara terukur dapat memperoleh margin pembiayaan yang lebih kompetitif atau jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang,” katanya.

ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance dan Pendekatan *Just Transition*

Leonard juga memandang industri keuangan syariah perlu mengacu pada ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance yang dikembangkan oleh ASEAN Taxonomy Board (ATB) guna menavigasi transisi yang berkeadilan (*just transition*), khususnya versi keempat yang diterbitkan pada November 2025. Panduan ini menyediakan kriteria teknis yang terstandarisasi untuk menilai apakah suatu aktivitas bisnis benar-benar dapat dikategorikan sebagai berkelanjutan.

ASEAN Taxonomy memberikan ruang pada bank untuk memberikan pembiayaan pada sektor usaha yang termasuk dalam kategori *Amber*, yaitu perusahaan yang masih berada dalam proses transisi dalam menyelaraskan target Perjanjian Paris, pembatasan kenaikan suhu 1,5° C.

“Bank syariah dapat membiayai perusahaan dengan emisi tinggi yang memiliki komitmen nyata untuk melakukan dekarbonisasi, daripada melakukan penghentian pembiayaan secara mendadak yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi negatif,” jelasnya.

Pada akhirnya, sektor perbankan syariah dapat menerapkan pendekatan *just transition* atau transisi yang berkeadilan, selaras dengan prinsip *Maslaha* dalam Islam yang menekankan kemaslahatan umum. Apalagi permintaan pasar terhadap pembiayaan keberlanjutan terus meningkat.

Ia memberikan contoh bahwa di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) pada sukuk berkelanjutan. Di sisi lain, Malaysia terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin penerbitan sukuk berkelanjutan melalui kerangka Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework.

Standar IFRS S2 untuk Memperkuat Manajemen Risiko Iklim

Selanjutnya, International Financial Reporting Standards (IFRS) S2 yang diterbitkan oleh ISSB juga perlu diterapkan guna memperkuat manajemen risiko iklim. Risiko terkait perubahan iklim semakin menjadi risiko keuangan material yang dapat memengaruhi kinerja pembiayaan, valuasi agunan, keberlangsungan operasional, dan ketahanan institusi.

Oleh karena itu, manajemen risiko iklim tidak lagi dapat dipandang semata sebagai inisiatif keberlanjutan yang bersifat sukarela, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab fidusia dan manajemen risiko perusahaan (*enterprise risk management*).

"Kita juga perlu melihat penerapan lapisan risiko iklim (*climate-risk overlay*) secara khusus dalam perhitungan *expected credit loss* (ECL), disertai dengan *stress testing* yang ketat terhadap nilai agunan pada berbagai skenario pemanasan global," ujar Leonard dalam artikelnya.

IFRS S2 memandu industri keuangan syariah dalam mengelompokkan risiko iklim ke dalam dua kategori utama, yaitu risiko fisik (*physical risk*) dan risiko transisi (*transition risk*). Risiko fisik mencakup peristiwa seperti banjir yang merusak aset agunan, sementara risiko transisi muncul akibat perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat menyebabkan aset-aset berbasis karbon tinggi kehilangan nilainya atau menjadi *stranded assets*.

Adanya risiko transisi bukan berarti menjadi alasan industri keuangan syariah, khususnya perbankan, tidak memedulikan UMKM maupun perusahaan besar yang memiliki intensitas karbon tinggi. Justru melalui standar ini, perbankan syariah memiliki kendali untuk mendorong pembiayaan bagi nasabahnya yang berkomitmen melakukan transisi.

Dengan mengintegrasikan *Green Productivity*, ASEAN Taxonomy, dan IFRS S2, industri keuangan syariah dapat memperkuat perannya dalam mendorong transisi yang berkeadilan menuju ekonomi rendah karbon dengan menghasilkan manfaat lingkungan dan ekonomi yang dapat diukur secara nyata.

Artikel ini merupakan ringkasan dan adaptasi dari artikel asli berjudul "Beyond Greenwashing: Integrating Climate Risk Management and Green Productivity" karya Leonard Tiopan Panjaitan, yang pertama kali dipublikasikan di Islamic Finance News (IFN) Volume 23 Edisi 14 (8 April 2026): <https://www.islamicfinancenews.com/beyond-greenwashing-integrating-climate-risk-management-and-green-productivity.html?access-key=8e07aa10a5403c30415e19d7cd694b97>, dan kemudian dipublikasikan kembali di Green Productivity Blog (16 April 2026): <https://greenproductivityblog.wordpress.com/2026/04/16/beyond-greenwashing-integrating-climate-risk-management-and-green-productivity/>. Artikel ini dipublikasikan dengan izin dari penulis dan tetap mencantumkan atribusi kepada sumber publikasi asli.

Artikel ini tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris yang dipublikasikan oleh ICSP merupakan ringkasan dan adaptasi dari artikel asli. Versi Bahasa Indonesia disediakan untuk memudahkan akses bagi pembaca Indonesia. Terjemahan ini tidak disusun oleh penulis, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan interpretasi atau nuansa bahasa. Untuk pemahaman yang lebih akurat, pembaca disarankan merujuk pada artikel asli yang dipublikasikan oleh Islamic Finance News (IFN) dan Green Productivity Blog.